



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DUKUNGAN KABINET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PURNOMO SUCIPTO
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, DAN HAK ASASI MANUSIA
3. NHK : 464353

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.225.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/77 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 50.000.000

1. MOTOR, HONDA NF 125TD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
3. LAINNYA, UNITED SEPEDA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. LAINNYA, POLIGON ELEKTRIK Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
5. LAINNYA, POLIGON SEPEDA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
6. LAINNYA, UNITED SEPEDA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 69.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 34.057.625



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 1.378.057.625

III. HUTANG

Rp. 280.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.098.057.625

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.